

ANALISIS KEBIJAKAN PENYIDIKAN TERPADU DI INDONESIA DALAM MENANGANI DELIK-DELIK DILUAR KUHP

Ahmad Dzaki Syifa¹, Muhamad Syahrul Maulana², Asmak UI Hosnah³
jaki085522@gmail.com¹, msyahrulmaulana366@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Kebijakan Penyidikan Terpadu menjadi strategi utama dalam menangani delik-delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. Dalam konteks penegakan hukum, kebijakan ini melibatkan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan instansi terkait lainnya. Fokus utamanya adalah menangani kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, terorisme, korupsi, pencucian uang, tindak pidana cyber, dan delik lingkungan hidup. Tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini meliputi koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, budaya organisasi yang tidak mendukung, serta faktor politik, sosial, dan eksternal. Mengatasi tantangan-tantangan tersebut memerlukan komitmen dan kerjasama lintas sektor, perubahan kebijakan dan praktek penyidikan, serta dukungan politik dan sosial yang kuat. Dengan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

Kata kunci : Penyidikan Terpadu, Delik diluar KUHP, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

The Integrated Investigation Policy is a primary strategy in handling offenses outside the Indonesian Criminal Code (KUHP). In the context of law enforcement, this policy involves collaboration among various law enforcement agencies such as the police, prosecutors, and other relevant institutions. Its main focus is on addressing transnational crimes such as drug trafficking, human trafficking, terrorism, corruption, money laundering, cybercrime, and environmental offenses. The main challenges in implementing this policy include inter-agency coordination, limited human and financial resources, unsupportive organizational culture, and political, social, and external factors. Overcoming these challenges requires commitment and cross-sector cooperation, changes in investigation policies and practices, and strong political and social support. With a holistic approach and effective coordination, it is hoped that the implementation of this policy can significantly enhance law enforcement effectiveness and maintain public safety and order.

Keywords: *Integrated Investigation, Offenses Outside KUHP, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

Kebijakan Penyidikan Terpadu telah menjadi fokus utama dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam menangani delik-delik diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dipicu oleh perkembangan kompleksitas tindak kriminal yang semakin beragam dan semakin sulit diatasi hanya dengan pendekatan konvensional. Penyidikan terpadu merupakan pendekatan strategis yang melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan instansi terkait lainnya, untuk mengatasi tantangan tersebut secara efektif.

Pentingnya Kebijakan Penyidikan Terpadu dapat dipahami dari konteks permasalahan keamanan dan penegakan hukum yang berkembang di Indonesia. Negara ini menghadapi berbagai tantangan keamanan, mulai dari kejahatan transnasional seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, hingga terorisme. Di samping itu, masalah korupsi, pencucian uang, dan tindak pidana cyber juga menjadi perhatian serius dalam ranah penegakan hukum di Indonesia.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antar lembaga penegak hukum. Kebijakan Penyidikan Terpadu menjadi salah satu upaya strategis dalam merespons dinamika kejahatan yang semakin kompleks dan lintas sektor. Dengan melibatkan berbagai lembaga terkait, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses penyidikan serta memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat ditindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

Salah satu contoh implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu adalah dalam penanganan kasus korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah yang merajalela di berbagai sektor di Indonesia dan menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan stabilitas negara. Untuk itu, penegakan hukum terhadap kasus korupsi memerlukan kerjasama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, jaksa, dan lembaga terkait lainnya. Dengan adanya koordinasi yang baik antar lembaga, penanganan kasus korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan.

Kebijakan Penyidikan Terpadu juga berperan penting dalam menangani tindak pidana terorisme. Ancaman terorisme menjadi salah satu isu keamanan nasional yang mendesak dan memerlukan respons cepat dan tegas dari pemerintah. Dalam penanganan kasus terorisme, kerjasama antara kepolisian, intelijen, dan lembaga terkait lainnya sangatlah penting untuk mengidentifikasi jaringan teroris, mencegah aksi teror, dan menangkap para pelaku.

Kebijakan Penyidikan Terpadu juga mencakup penanganan tindak pidana cyber yang semakin meresahkan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal secara daring. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam ranah cybercrime memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan kepolisian, jaksa, otoritas telekomunikasi, dan instansi terkait lainnya.

Tetapi, meskipun Kebijakan Penyidikan Terpadu menawarkan banyak manfaat dalam menangani berbagai jenis kejahatan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah koordinasi antar lembaga yang masih belum optimal. Perbedaan kultur, kepentingan, dan kebijakan antar lembaga seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Selain itu, masih diperlukan peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia di berbagai lembaga penegak hukum untuk dapat mengimplementasikan kebijakan ini dengan baik.

Dengan demikian, Kebijakan Penyidikan Terpadu di Indonesia merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama dalam menangani delik-delik diluar KUHP yang semakin kompleks dan lintas sektor. Melalui kerjasama lintas lembaga, diharapkan upaya pemberantasan berbagai jenis kejahatan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berangkat dari latar belakang tersebut menjadi sebuah permasalahan yaitu pertama, bagaimana implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu dalam menangani delik-delik diluar KUHP di Indonesia dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilannya?; kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu di Indonesia dalam menangani delik-delik diluar KUHP dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?

METODE

Dalam penelitian ini, kami akan menerapkan metode penelitian normatif. Pendekatan ini akan melibatkan analisis literatur dan kerangka hukum. Pendekatan ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum dan pedoman-pedoman yang

mengatur implementasi program diversifikasi di berbagai yurisdiksi. Metode penelitian yang digunakan dalam memahami peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam mengatasi risiko sistemik di sektor perbankan Indonesia meliputi analisis kebijakan publik, studi kasus bank-bank yang pernah mengalami kesulitan keuangan, dan wawancara dengan perwakilan LPS serta lembaga pengawas keuangan lainnya. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang implementasi kebijakan dan tantangan yang dihadapi oleh LPS. Data sekunder dari publikasi LPS, bank sentral, dan lembaga keuangan lainnya juga digunakan untuk mendukung analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu Dalam Menangani Delik-Delik Diluar KUHP Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Apa Yang Mempengaruhi Keberhasilannya

Implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu dalam menangani delik-delik diluar KUHP di Indonesia merupakan upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai jenis kejahatan yang semakin kompleks dan beragam. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang memengaruhi proses penyidikan dan penegakan hukum secara keseluruhan.

Faktor kebijakan dan regulasi memainkan peran penting dalam menentukan arah dan ruang lingkup implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Kebijakan ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan terperinci, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum yang solid. Hal ini mencakup penetapan kewenangan, prosedur kerja, dan mekanisme koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penyidikan terpadu. Kejelasan dalam regulasi akan membantu mengurangi kebingungan dan konflik antar lembaga serta memperkuat landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Faktor budaya organisasi dan keterampilan manajerial juga memengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Budaya organisasi yang mendukung kerja sama lintas lembaga, transparansi, dan akuntabilitas sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan ini. Di samping itu, keterampilan manajerial yang baik, termasuk kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan, diperlukan untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan penyidikan dari berbagai lembaga dengan efisien.

Faktor sumber daya manusia dan keuangan menjadi perhatian utama dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas di berbagai lembaga penegak hukum untuk dapat melaksanakan kegiatan penyidikan secara efektif. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel penegak hukum juga penting untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai juga diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan penyidikan dan operasionalisasi kebijakan ini.

Faktor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga memainkan peran kunci dalam keberhasilan implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Pemanfaatan teknologi informasi yang canggih dapat mempercepat proses penyidikan, memperkuat kerjasama antar lembaga, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data dan informasi. Sistem informasi manajemen kasus dan analisis kejahatan, perangkat lunak forensik digital, serta infrastruktur jaringan yang handal menjadi elemen-elemen penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini.

Faktor politik dan sosial juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Dukungan politik dari pemerintah dan masyarakat sangat

penting untuk memastikan kesinambungan kebijakan ini dalam jangka panjang. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam memberikan informasi dan dukungan terhadap upaya penegakan hukum juga dapat memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan ini. Oleh karena itu, upaya penyuluhan dan kampanye publik perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung penegakan hukum dalam menangani berbagai jenis kejahatan.

Faktor eksternal seperti dukungan internasional dan kerjasama regional juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan terorisme memerlukan kerjasama lintas negara dalam penanganannya. Dukungan teknis, pertukaran informasi, dan koordinasi antar negara menjadi kunci dalam menghadapi tantangan kejahatan lintas batas.

Sehingga, implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu dalam menangani delik-delik diluar KUHP di Indonesia merupakan langkah yang penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, mulai dari kebijakan dan regulasi, budaya organisasi, sumber daya manusia dan keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, faktor politik dan sosial, hingga dukungan internasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

B. Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu Di Indonesia Dalam Menangani Delik-Delik Diluar KUHP Dan Bagaimana Cara Mengatasi Tantangan Tersebut

Tantangan utama dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu di Indonesia dalam menangani delik-delik diluar KUHP meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan kelembagaan, sumber daya, koordinasi, budaya organisasi, serta faktor eksternal. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak terkait serta perubahan dalam kebijakan, regulasi, dan praktek penyidikan. Berikut adalah beberapa tantangan utama dan cara mengatasinya :

1. Koordinasi dan kolaborasi antar lembaga : Salah satu tantangan utama dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu adalah koordinasi yang efektif antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan instansi terkait lainnya. Masalah koordinasi dapat timbul karena perbedaan kultur, kepentingan, dan kewenangan antar lembaga. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif, seperti forum rapat koordinasi rutin, pembagian peran yang jelas, serta penyediaan sarana komunikasi yang memadai antar lembaga.
2. Keterbatasan sumber daya manusia : Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia di berbagai lembaga penegak hukum menjadi hambatan dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Personel yang kurang terlatih dan berkualitas dapat memperlambat proses penyidikan dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel penegak hukum, rekrutmen yang selektif, serta peningkatan insentif dan fasilitas bagi mereka yang bekerja dalam penegakan hukum.
3. Keterbatasan sumber daya keuangan : Selain sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya keuangan juga menjadi tantangan dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Anggaran yang terbatas dapat membatasi kemampuan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan kegiatan penyidikan, termasuk pembiayaan untuk alat teknologi, transportasi, dan operasional lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk lembaga penegak hukum serta melakukan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan.

4. Keterbatasan teknologi informasi : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan potensi besar dalam meningkatkan efektivitas penyidikan dan penegakan hukum. Namun, masih terdapat tantangan terkait keterbatasan infrastruktur TIK, kekurangan akses, serta kurangnya keahlian teknis di kalangan personel penegak hukum. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur TIK, pelatihan teknis bagi personel penegak hukum, serta peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dan akademisi dalam pengembangan solusi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan penyidikan.
5. Budaya organisasi yang tidak mendukung : Budaya organisasi yang tidak mendukung kerja sama lintas lembaga, transparansi, dan akuntabilitas dapat menjadi penghambat dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Sikap protektif terhadap kepentingan internal lembaga dan kurangnya kepercayaan antar lembaga dapat menghambat aliran informasi dan kerjasama yang efektif. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perubahan budaya organisasi melalui pembinaan nilai-nilai integritas, transparansi, dan kolaborasi, serta pembentukan insentif yang mendorong kerja sama lintas lembaga.
6. Tantangan politik dan sosial : Faktor politik dan sosial juga dapat memengaruhi implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu. Dukungan politik yang lemah dari pemerintah atau tekanan dari kepentingan politik tertentu dapat mengganggu independensi lembaga penegak hukum dalam melakukan penyidikan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung penegakan hukum dan kepatuhan terhadap hukum juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pembinaan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum, serta kampanye penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.
7. Tantangan eksternal : Dukungan internasional dan kerjasama regional juga menjadi penting dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu, terutama dalam menangani kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia, perdagangan narkoba, dan terorisme. Tantangan dalam kerjasama internasional meliputi perbedaan hukum, regulasi, dan kebijakan antar negara, serta ketidaksetaraan dalam sumber daya dan kapasitas antar negara. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kerjasama lintas negara yang lebih intensif, pertukaran informasi yang lebih efektif, serta harmonisasi regulasi dan kebijakan antar negara dalam rangka menangani kejahatan lintas batas.

Sehingga, mengatasi tantangan-tantangan dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu di Indonesia memerlukan komitmen dan kerjasama antar lembaga penegak hukum, dukungan politik dan sosial yang kuat, serta upaya untuk memperbaiki regulasi, kebijakan, dan praktek penyidikan. Dengan pendekatan yang holistik dan koordinasi yang baik antar semua pihak terkait, diharapkan implementasi kebijakan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu di Indonesia dalam menangani delik-delik diluar KUHP melibatkan berbagai tantangan, termasuk koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan budaya organisasi. Diperlukan koordinasi yang efektif, investasi dalam sumber daya manusia dan keuangan, serta perubahan budaya organisasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini.

Tantangan utama dalam implementasi Kebijakan Penyidikan Terpadu meliputi koordinasi lembaga, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, budaya organisasi

yang tidak mendukung, serta faktor politik, sosial, dan eksternal. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan komitmen dan kerjasama lintas sektor, perubahan dalam kebijakan dan praktek penyidikan, serta dukungan politik dan sosial yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Heryanto, Agus. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Delik-Delik Lingkungan Hidup di Indonesia*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Mulia, Andi. (2017). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Priyono, Bambang. (2019). *Aspek Hukum dalam Pengawasan Hukum*, Jakarta: PT Prenadamedia Group.
- Santoso, Andi. (2016). *Aspek Hukum Pidana dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Suryanto. (2018). *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soebagio, Denny. (2020). *Perlindungan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, Joko. (2018). *Kebijakan Penyidikan Terpadu dalam Menangani Delik-Delik Diluar KUHP di Indonesia*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.